



**Pemerintah  
Kabupaten Sleman**

**RENCANA KERJA (RENJA)  
KECAMATAN DEPOK TAHUN 2021**

## **DAFTAR ISI**

Daftar Isi.....	i
Bab I    Pendahuluan .....	1
1.1.    Latar Belakang.....	1
1.2.    Landasan Hukum.....	2
1.3.    Maksud dan Tujuan .....	3
1.4.    Sistematika Penulisan .....	3
Bab II    Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Depok Tahun 2019.....	6
2.1.    Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra 2019.....	6
2.2.    Analisis Kinerja Pelayanan.....	15
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi .....	23
Bab III  Tujuan dan Sasaran Kecamatan Depok .....	24
3.1.    Tujuan dan Sasaran .....	24
3.2.    Program dan Kegiatan .....	25
Bab IV  Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Depok .....	26
Bab V    Penutup.....	32
Lampiran	



**BUPATI SLEMAN**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan program pembangunan di daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021, maka perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;



Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan



Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 141);
10. Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2021.
2. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.



BAB II  
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 berfungsi sebagai dasar acuan dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan Perangkat Daerah, yang dibiayai dengan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
- BAB V PENUTUP

Pasal 4

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO



Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 24 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 34



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kecamatan Depok merupakan dokumen perencanaan dan pendanaan yang berisi program dan kegiatan Kecamatan Depok sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra Kecamatan Depok dalam satu tahun anggaran disertai dana yang diperlukan untuk pelaksanaannya yang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena diterbitkannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan Permendagri tersebut, maka terdapat penggantian nomenklatur, program, kegiatan dan sub kegiatan serta kodefikasi perangkat daerah, sehingga terdapat perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dengan yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Tahun 2016-2021.

Dalam sistem perencanaan pembangunan daerah, Renja Kecamatan Depok Tahun 2021 merupakan:

1. Pedoman bagi Kecamatan Depok dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2021.
2. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.



## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Kecamatan Depok tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- 8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025;
- 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9

- Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sleman Tahun 2016-2021;
- 10) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman;
  - 11) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kalurahan;
  - 12) Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon;
  - 13) Peraturan Bupati Sleman Nomor 31 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021.

### **1.3. MAKSUD DAN TUJUAN**

#### 1.3.1. Maksud

- 1) Memberikan informasi pencapaian hasil tahun sebelumnya serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Kecamatan Depok;
- 2) Menjabarkan rencana strategis perencanaan pembangunan yang telah dituangkan dalam Renstra Kecamatan Depok dalam bentuk rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

#### 1.3.2. Tujuan

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan RKA-DPA Tahun 2021;
- 2) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan penganggaran dengan memperhatikan kerangka regulasi dan kerangka anggaran Kecamatan Depok yang telah ditetapkan pagu dana indikatifnya.

### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja Kecamatan Depok agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Kecamatan Depok, proses penyusunan Renja Kecamatan Depok, keterkaitan antara Renja Kecamatan Depok dengan dokumen RKPD dan Renstra Kecamatan Depok.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Kecamatan Depok, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Kecamatan Depok.

#### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Kecamatan Depok.

#### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Kecamatan Depok, serta susunan garis besar isi dokumen.

### **BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019**

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RenjaPerangkat Daerah Tahun 2019 dan Capaian Renstra di Tahun 2019.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Depok tahun 2019 dan pencapaian target Renstra Kecamatan Depok Tahun 2016-2021 di tahun keempat (2019).

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayananberdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM (bagi perangkat daerah yang melaksanakan SPM), maupun terhadap Indikator Kinerja Utama.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

#### 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Berisikan uraian mengenai:

1. Tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi;
3. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan; dan

4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DEPOK**

#### 3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Berisikan tujuan dan sasaran yang tercantum pada Renstra sesuai tahun berkenaan. Tujuan dan Sasaran dilengkapi dengan indikator tujuan dan indicator sasaran beserta target tahun 2021.

#### 3.2. Program dan Kegiatan

Berisikan tabel rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah.

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Disajikan dalam bentuk matrik rencana program dan kegiatan disertai penjelasan diluar tabel mengenai uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:

- Jumlah program dan jumlah kegiatan yang direncanakan
- Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

### **BAB V. PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian rangka pelaksanaan renja, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

## **BAB II**

### **HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN DEPOK TAHUN 2019**

#### **2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA DI TAHUN 2019**

Berdasarkan pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2019, predikat kinerja program masuk kategori Sangat Tinggi (96.86 %).

Hasil pengendalian dan evaluasi terhadap hasil Rencana Kerja Kecamatan Depok Tahun 2019 adalah sebagaimana tabel Form E.81 Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD sebagaimana pada tabel 2.1.1 berikut:



Formulir E.81  
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten  
RENJA KECAMATAN DEPOK  
Tahun 2019

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)	Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)			Ket		
					K	Rp		K	Rp	DPA	Renja	I	II	III	IV	DPA	Renja							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%			18							
					K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	Rp(000)			
1		1.01.05.3.00.01.08.22	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Persentase kondisi prasarana dan sarana penanggulangan bencana baik, Jumlah masyarakat terlatih pada daerah rawan bencana					71%, 9528 orang															
1.1		1.01.05.3.00.01.08.22.028	Pencegahan dan pengurangan resiko bencana							22.902,50	22.902,50	80,00%	18.215,00	6,00%	1.400,00	7,00%	950,00	7,00%	1.089,50	100,00%	21.654,50	100,00%	94,55%	94,55%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			100,00%	94,55%	94,55%			
<b>Predikat Kinerja</b>																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
2		1.01.05.3.00.01.08.24	Program penegakan hukum	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani					100 %															
2.1		1.01.05.3.00.01.08.24.004	Operasi Penertiban							46.772,00	46.772,00	27,50%	12.680,00	37,50%	17.560,00	15,00%	5.780,00	20,00%	10.712,00	100,00%	46.732,00	100,00%	99,91%	99,91%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			100,00%	99,91%	99,91%			
<b>Predikat Kinerja</b>																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
3		1.01.05.3.00.01.08.25	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	peningkatan kapasitas anggota linmas					2030 orang															
3.1		1.01.05.3.00.01.08.25.002	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan							242.104,00	245.754,00	10,00%	13.280,00	69,00%	177.015,00	11,00%	14.615,00	10,00%	34.572,50	100,00%	239.482,50	100,00%	98,92%	97,45%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			100,00%	98,92%	97,45%			
<b>Predikat Kinerja</b>																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
4		1.02.04.3.00.01.08.16	Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tertib Administrasi Pertanahan					91%															
4.1		1.02.04.3.00.01.08.16.007	Monitoring dan evaluasi Tata Guna Tanah							5.627,00	5.627,00	33,50%	1.875,50	32,50%	1.795,00	33,00%	1.795,00	1,00%	161,50	100,00%	5.627,00	100,00%	100,00%	100,00%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			100,00%	100,00%	100,00%			
<b>Predikat Kinerja</b>																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)			Ket		
					K	Rp	K	Rp	DPA		Renja		I		II		III			IV		DPA		Renja	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%			18			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	Rp(000)	
5		1.02.06.3.00.01.08.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga, Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran, Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian					100%, 99,32%, 89%, 58%																
5.1		1.02.06.3.00.01.08.15.029	Pelaksanaan kebijakan kependudukan							135.897,00	135.897,00	28,00%	37.549,00	22,00%	28.728,50	29,00%	37.622,08	21,00%	28.839,55	100,00%	132.739,13	100,00%	97,68%	97,68%	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			100,00%	97,68%	97,68%				
<b>Predikat Kinerja</b>																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
6		1.02.07.3.00.01.08.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Keaktifan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Desa					80%																
6.1		1.02.07.3.00.01.08.17.024	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang sosial							124.207,50	124.207,50	19,70%	25.699,00	41,30%	53.627,50	29,00%	29.225,00	10,00%	15.635,00	100,00%	124.186,50	100,00%	99,98%	99,98%	
6.2		1.02.07.3.00.01.08.17.031	Pembinaan Pemberdayaan masyarakat bidang Ekonomi dan Fisik							388.049,75	388.049,75	19,50%	74.941,00	27,50%	105.693,50	52,00%	201.629,25	1,00%	5.774,00	100,00%	388.037,75	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			100,00%	99,99%	99,99%				
<b>Predikat Kinerja</b>																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
7		1.02.07.3.00.01.08.18	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparatur pemerintah desa yang telah mengikuti pelatihan sesuai tupoksinya					90%																
7.1		1.02.07.3.00.01.08.18.005	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Kepala dan Perangkat Desa							7.430,00	7.430,00	32,00%	2.375,00	68,00%	5.055,00					100,00%	7.430,00	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																			100,00%	100,00%	100,00%				
<b>Predikat Kinerja</b>																			Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)			Ket	
					K	Rp	K	Rp	DPA		Renja		I		II		III		IV		13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%		
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%			18			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	Rp(000)	
8		1.02.10.3.00.01.08.15	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase OPD yang terkoneksi jaringan komputer, Jumlah publikasi informasi melalui media online, Jumlah lelang pengadaan barang jasa, Persentase menara dan tiang telekomunikasi yang berjin					100%, 360 publikasi, 250 lelang, 75%																
8.1		1.02.10.3.00.01.08.15.044	Pengelolaan Informasi Publik Perangkat Daerah							6.175,00	6.175,00	25,00%	1.485,00	37,00%	2.305,00	25,00%	1.305,00	13,00%	1.080,00	100,00%	6.175,00	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																				100,00%	100,00%	100,00%			
<b>Predikat Kinerja</b>																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
9		1.02.14.3.00.01.08.15	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase dokumen statistik daerah tersedia tepat waktu					95%																
9.1		1.02.14.3.00.01.08.15.001	Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah							6.340,00	6.340,00	30,50%	1.925,70	6,50%	375,00	38,00%	2.124,00	25,00%	1.915,25	100,00%	6.339,95	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																				100,00%	100,00%	100,00%			
<b>Predikat Kinerja</b>																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
10		1.02.16.3.00.01.08.15	Program Pengembangan Nilai Budaya	Persentase pengelolaan nilai-nilai budaya tradisi dalam masyarakat					65%																
10.1		1.02.16.3.00.01.08.15.007	Pelestarian warisan budaya dan pengembangan nilai budaya lokal							246.000,00	246.000,00	45,00%	105.415,00	9,00%	20.090,00	34,00%	79.011,00	12,00%	41.384,00	100,00%	245.900,00	100,00%	99,96%	99,96%	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																				100,00%	99,96%	99,96%			
<b>Predikat Kinerja</b>																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			
11		1.02.18.3.00.01.08.16	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Persentase jumlah dokumen arsip yang mempunyai nilai guna yang diselamatkan.					20%																
11.1		1.02.18.3.00.01.08.16.006	Pengelolaan Dokumen SKPD							9.175,00	9.175,00	75,80%	6.945,00	4,20%	375,00	5,00%	397,50	15,00%	1.457,50	100,00%	9.175,00	100,00%	100,00%	100,00%	
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																				100,00%	100,00%	100,00%			
<b>Predikat Kinerja</b>																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi			

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)			Ket		
					K	Rp	K	Rp	DPA		Renja		I		II		III		IV		13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%	
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%			18		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	Rp(000)
12		3.00.01.3.00.01.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran					100%															
12.1		3.00.01.3.00.01.08.01.007	Penyediaan jasa administrasi keuangan							36.340,00	36.475,00	25,00%	7.665,00	26,00%	8.265,00	18,00%	9.085,00	31,00%	11.325,00	100,00%	36.340,00	100,00%	100,00%	99,63%
12.2		3.00.01.3.00.01.08.01.024	Penyediaan jasa keamanan dan Kebersihan							137.337,00	137.337,00	33,50%	45.050,34	25,50%	35.316,21	21,00%	28.060,74	20,00%	28.148,61	100,00%	136.575,90	100,00%	99,45%	99,45%
12.3		3.00.01.3.00.01.08.01.025	Penunjang pelayanan administrasi perkantoran							375.805,00	375.805,00	48,00%	83.050,02	17,00%	29.407,51	-5,00%	88.697,47	40,00%	152.208,10	100,00%	353.363,10	100,00%	94,03%	94,03%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																				100,00%	97,82%	97,70%		
<b>Predikat Kinerja</b>																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
13		3.00.01.3.00.01.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik					75%															
13.1		3.00.01.3.00.01.08.02.033	Pemeliharaan rutin/berkala gedung, kendaraan, peralatan, mesin dan meubelair							264.780,70	264.780,70	20,00%	51.040,95	21,00%	54.648,40	24,00%	65.293,60	32,00%	56.091,55	97,00%	227.074,50	97,00%	85,76%	85,76%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																				97,00%	85,76%	85,76%		
<b>Predikat Kinerja</b>																				Sangat Tinggi	Tinggi	Tinggi		
14		3.00.01.3.00.01.08.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu					98%															
14.1		3.00.01.3.00.01.08.05.009	Pengelolaan kepegawaian dan peningkatan kapasitas pegawai							63.916,00	63.916,00	15,00%	8.109,10	25,00%	14.508,50	25,00%	14.095,10	35,00%	24.554,65	100,00%	61.267,35	100,00%	95,86%	95,86%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																				100,00%	95,86%	95,86%		
<b>Predikat Kinerja</b>																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		
15		3.00.01.3.00.01.08.06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase pelaporan capaian kinerja dan keuangan dilaksanakan tepat waktu					100%															
15.1		3.00.01.3.00.01.08.06.015	Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							34.270,00	34.270,00	20,00%	6.394,50	37,00%	12.960,00	17,00%	5.290,00	26,00%	9.361,50	100,00%	34.006,00	100,00%	99,23%	99,23%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																				100,00%	99,23%	99,23%		
<b>Predikat Kinerja</b>																				Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi		



No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)			Ket																
					K	Rp	K	Rp	DPA		Renja		I		II		III		IV		13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%															
1	2	3	4	5	6		7		8				9				10				11				12				13=9+10+11+12				14=(13/8)* 100%				18	
					K	Rp	K	Rp	K	Rp(000)	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)	K	Rp(000)			
19.1		3.00.04.3.00.01.08.18.009	Penyelenggaraan musrenbang RKPD							30.245,00	30.245,00	70,80%	21.324,00					2,20%		27,00%	8.921,00	100,00%	30.245,00	100,00%	100,00%	100,00%												
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																		100,00%	100,00%	100,00%																		
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																		
20		3.00.05.3.00.01.08.15	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dengan baik dan benar, Presentase SKPD yang tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)/aset daerah, Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti						100%, 100%, 100%																												
20.1		3.00.05.3.00.01.08.15.111	Penatausahaan keuangan dan aset SKPD							7.840,00	7.840,00	22,00%	1.719,55	18,50%	1.375,00	28,50%	2.031,20	31,00%	2.714,25	100,00%	7.840,00	100,00%	100,00%	100,00%														
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																		100,00%	100,00%	100,00%																		
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																		
21		3.00.05.3.00.01.08.17	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Jumlah desa yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai PP Nomor 43 Tahun 2014 atau peraturan perundang-undangan perubahan terkini apabila nantinya akan diubah						86 desa																												
21.1		3.00.05.3.00.01.08.17.001	Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDes							22.770,00	22.770,00	26,00%	5.870,00			24,00%	4.575,00	50,00%	12.225,00	100,00%	22.670,00	100,00%	99,56%	99,56%														
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																		100,00%	99,56%	99,56%																		
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																		
22		3.00.08.3.00.01.08.16	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase Penanganan Kejadian SARA						100%																												
22.1		3.00.08.3.00.01.08.16.017	Penyelenggaraan upacara kenegaraan dan kegiatan kemasyarakatan							172.925,00	172.925,00	10,00%	5.660,00	-5,00%	2.100,00	90,00%	154.996,00	5,00%	7.850,00	100,00%	170.606,00	100,00%	98,66%	98,66%														
<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>																		100,00%	98,66%	98,66%																		
<b>Predikat Kinerja</b>																		Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																		

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) DPA	Target Renstra PD pada tahun 2019 (Akhir Periode Renstra PD)		Realisasi Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD tahun lalu (n-2)		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (2019)				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (2019)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2019 (%)			Ket									
					K	Rp	K	Rp	DPA		Renja		I		II			III		IV		DPA		Renja						
1	2	3	4	5	6	7	8			9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=(13/8)* 100%			18							
K							Rp		Rp(000)		Rp(000)		K	Rp(000)		K	Rp(000)		K	Rp(000)		K	Rp(000)		K	Rp(000)		K	Rp(000)	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM							2.518.701,45		2.522.486,45		564.934,67		596.308,11		776.675,14		505.350,70		2.443.268,62											
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM							31,58%		22,43%		55,17%		23,68%		79,33%		30,84%		99,64%		20,06%				99,64%			97,01%	96,86%	
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM																							Sangat Tinggi							

Faktor pendorong keberhasilan kinerja	1.01.05.3.00.01.08.22.028 PENCEGAHAN DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	1.01.05.3.00.01.08.24.004 OPERASI PENERTIBAN	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	1.01.05.3.00.01.08.25.002 PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN APARAT KEAMANAN DALAM TEKNIK PENCEGAHAN KEJAHATAN	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	1.02.04.3.00.01.08.16.007 MONITORING DAN EVALUASI TATA GUNA TANAH	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	1.02.06.3.00.01.08.15.029 PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	1.02.07.3.00.01.08.17.024 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG SOSIAL	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	1.02.07.3.00.01.08.17.031 PEMBINAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG EKONOMI DAN FISIK	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	1.02.07.3.00.01.08.18.005 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KEPALA DAN PERANGKAT DESA	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	1.02.10.3.00.01.08.15.044 PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PERANGKAT DAERAH	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	1.02.14.3.00.01.08.15.001 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA DAN STATISTIK DAERAH	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	1.02.16.3.00.01.08.15.007 PELESTARIAN WARISAN BUDAYA DAN PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA LOKAL	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	1.02.18.3.00.01.08.16.006 PENGELOLAAN DOKUMEN SKPD	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
	3.00.01.3.00.01.08.01.007 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran
3.00.01.3.00.01.08.01.024 PENYEDIAAN JASA KEAMANAN DAN KEBERSIHAN	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran	
3.00.01.3.00.01.08.01.025 PENUNJANG PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran	
3.00.01.3.00.01.08.05.009 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS PEGAWAI	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran	
3.00.01.3.00.01.08.06.015 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran	
3.00.01.3.00.01.08.21.012 MONITORING DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran	
3.00.03.3.00.01.08.15.018 PENGUATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran	
3.00.04.3.00.01.08.18.009 PENYELENGGARAAN MUSRENBANG RKPD	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran	
3.00.05.3.00.01.08.15.111 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN ASET SKPD	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran	
3.00.05.3.00.01.08.17.001 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBD	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran	
3.00.08.3.00.01.08.16.017 PENYELENGGARAAN UPACARA KENEGARAAN DAN KEGIATAN KEMASYARAKATAN	Adanya komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan dan disiplin dalam menggunakan anggaran	
Faktor penghambat pencapaian kinerja	3.00.01.3.00.01.08.02.033 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG, KENDARAAN, PERALATAN, MESIN DAN MEUBELAIR	Anggaran pemeliharaan printer e-KTP kurang mencukupi dengan biaya yang diperlukan
	3.00.01.3.00.01.08.20.035 PELAYANAN PERIJINAN	Pelaksanaan peninjauan lokasi menyesuaikan dengan pemohon yang mengajukan IMB dan IUMK
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya	3.00.01.3.00.01.08.02.033 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG, KENDARAAN, PERALATAN, MESIN DAN MEUBELAIR	Perencanaan kedepan lebih cermat
	3.00.01.3.00.01.08.20.035 PELAYANAN PERIJINAN	Perencanaan kedepan lebih cermat

\*) Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD kabupaten berikutnya

Disusun  
Sleman, 9 Januari 2020  
Camat Depok  
Kabupaten Sleman

Dievaluasi  
Sleman, 10 Januari 2020  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
Kabupaten Sleman

Abu Bakar, S.Sos, M.Si  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19710710 199101 1 002

Drs. Kunto Riyadi, MPPM  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 19640215 199103 1 007

Adapun capaian Renstra di tahun 2019, ditunjukkan dengan tabel berikut:

Tabel 2.1.2  
Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2019

Sasaran	Indikator Sasaran	Cara Perhitungan Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran		Realisasi	Tingkat Capaian	Predikat	
			Satuan	Tahun 2019				
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan	1. Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Tindak lanjut dibagi rekomendasi BPK/APIP dikalikan 100%	%	100	100	100	Berhasil
		2. Predikat AKIP	Predikat nilai AKIP	Predikat	A	*)	*)	*)
		3. Jumlah Desa yang melaksanakan Siklus Tahunan Desa tepat waktu	Jumlah desa	Desa	3	3	100	Berhasil
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	4. Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai hasil survey IKM	Nilai	78	80,75	103,52	Berhasil
3	Meningkatnya pengelolaan budaya dan kerukunan masyarakat di kecamatan	Konflik SARA	Jumlah kasus konflik SARA	Kasus	0	0	100	Berhasil

## 2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.8 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon, maka susunan organisasi Kecamatan Depok terdiri dari :

### 1. Panewu :

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di Kapanewon.

Panewu dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di Kapanewon;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Kalurahan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kapanewon;
- f. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- g. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- h. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- i. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- j. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- k. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- l. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati;
- m. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **2. Sekretariat :**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi, serta penatausahaan berkaitan dengan kegiatan urusan keistimewaan.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Sekretariat dan Kapanewon;
- b. perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. pelaksanaan urusan umum;



- d. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perencanaan dan evaluasi;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi lingkup Kapanewon; dan
- h. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan Kapanewon.

### **3. Subbagian Umum dan Kepegawaian :**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian

Subbagian umum dan kepegawaian dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian umum dan kepegawaian
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan umum dan urusan kepegawaian
- c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. Pengelolaan perlengkapan, keamanan, dan kebersihan;
- e. Pengelolaan dokumentasi dan informasi;
- f. Penyusunan perencanaan kebutuhan, pengembangan dan pembinaan pegawai;
- g. Pelayanan administrasi pegawai dan pengelolaan tata usaha kepegawaian; dan;
- h. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbagian Umum dan Kepegawaian.

### **4. Subbagian Keuangan, Perencanaan, dan Evaluasi**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi.

Subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja subbagian keuangan, perencanaan, dan evaluasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan keuangan, urusan perencanaan dan evaluasi;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana kerja Sekretariat dan rencana kerja Kecamatan;

- d. Pelaksanaan pembendaharaan, pembukuan, dan pelaporan keuangan;
- e. Pengoordinasian evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kerja Sekretariat dan pelaksanaan kerja Kecamatan;
- f. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Subbagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi;
- g. Memverifikasi pelaporan SPJ

## **5. Jawatan Praja**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum, membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan desa, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, serta melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang pertanahan dan bidang tata ruang.

Jawatan Praja dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Praja;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dan pembinaan dan pengawasan kegiatan desa;
- c. pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- d. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan desa;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kapanewon;
- f. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pemerintahan yang dilimpahkan Bupati;
- g. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang pertanahan;
- h. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang tata ruang; dan
- i. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Praja.

## **6. Jawatan Keamanan**

Jawatan Keamanan mempunyai tugas mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dan melaksanakan sebagian urusan

pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati.

Jawatan Keamanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Keamanan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- c. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup ketenteraman dan ketertiban yang dilimpahkan Bupati; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Keamanan.

#### **7. Jawatan Kemakmuran**

Jawatan Kemakmuran mempunyai tugas mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati.

Jawatan Kemakmuran dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Kemakmuran;
- b. perumusan kebijakan teknis pengoordinasian pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan serta pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup perekonomian dan pembangunan;
- d. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;

- e. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup perekonomian dan pembangunan yang dilimpahkan Bupati; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Kemakmuran. Bagian Kelima Jawatan Sosial

### **8. Jawatan Sosial**

Mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati serta sebagian urusan keistimewaan yang ditugaskan di bidang kebudayaan.

Jawatan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
- c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat lingkup kesejahteraan masyarakat;
- d. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesejahteraan masyarakat yang dilimpahkan Bupati;
- e. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan keistimewaan di bidang kebudayaan; dan
- f. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Sosial.

### **9. Jawatan Umum**

Mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum dan melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati.

Seksi pelayanan umum dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Jawatan Umum;
- b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- c. pelaksanaan dan pembinaan pelayanan umum;
- d. pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan lingkup pelayanan umum yang dilimpahkan Bupati; dan

- e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja Jawatan Umum

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, maka secara rinci jenis pelayanan yang diberikan Kecamatan Depok adalah:

No.	Jenis Pelayanan
1	Layanan perekaman data KTP elektronik (misi 1)
2	Layanan penerbitan KK (misi 1)
3	Layanan penerbitan IUMK (misi 3)
4	Layanan penerbitan IMB (misi 3)
5	Layanan aduan masyarakat tentang aduan lingkungan hidup (misi 4)
6	Layanan legalisir pengajuan Nomor Induk Kebudayaan (NIK) (misi 5)
7	Legalisasi pengajuan akta kelahiran, akta kematian, pindah penduduk, masuk penduduk, surat keterangan, fotocopy KK/KTP, surat pernyataan belum menikah, surat waris dan pengurusan tanah, kredit bank (misi 1)

Upaya Kecamatan Depok dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan diatas dapat dilihat dari indikator kinerja utama sebagai berikut :

No.	Sasaran SKPD	Indikator Sasaran SKPD	Satuan	Target						Keterangan
				2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Persentase	100	100	100	100	100	100	
		Predikat LAKIP	Nilai	A	A	A	A	A	A	
		Siklus Tahunan Desa tepat waktu	Desa	3	3	3	3	3	3	
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	78	78	78	78	78	78	
3.	Meningkatnya pengelolaan budaya dan kerukunan masyarakat di kecamatan	Konflik SARA	Kasus	0	0	0	0	0	0	

Tabel 2.2  
Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Depok  
Kabupaten Sleman

No	Indikator Kinerja Utama	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian		Catatan Analisis	
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020 (Jika sudah ada datanya)	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100			
2.	Predikat LAKIP	A	A	A				
3	Siklus Tahunan Desa tepat waktu	3	3	3	3			
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat	78	78	78	80.29			

### **2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Depok terdapat beberapa isu penting sebagai berikut:

- a. Rendahnya tingkat pemahaman petugas dalam melaksanakan tugas pelayanan
- b. Adanya aturan yang berubah secara cepat tanpa melihat kondisi riil di lapangan dan tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana
- c. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya pencegahan tindak kriminal
- d. Masihrendahnya jalinan kerjasama antara pemerintah dan swasta serta masyarakat
- e. Keterbatasan jumlah sumber daya aparatur pemerintah dengan kompetensinya yang tidak merata, serta kondisi prasarana dan prasarana kantor yang kurang memadai,
- f. Belum optimalnya pelaksanaan SOP yang telah disusun oleh SKPD
- g. Belum optimalnya pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang (alih fungsi lahan) serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan tertib administrasi pertanahan, administrasi kependudukan serta berbagai perizinan terkait,
- h. Penyelenggaraan dan pengelolaan pemerintah desa yang belum optimal serta peran lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang perlu ditingkatkan dan diberdayakan,
- i. Belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana infrastruktur (jalan, jembatan, jaringan irigasi, sara prasarana perekonomian) serta pengelolaan koperasi dan UKM
- j. Belum optimalnya sinergitas dan koordinasi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, pembinaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan seni budaya dan pelestarian tradisi serta pembinaan pemuda dan olah raga
- k. Belum optimalnya penegakkan perda, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan perundang-undangan dan belum semua masyarakat terlatih dalam penanggulangan kebencanaan.

## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN DEPOK

#### 3.1. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran renja Tahun 2021 sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

**Tabel 3.1.**  
**Tujuan – Sasaran**  
**Tahun 2021**

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2021
1	2	3	4	5	6
Menguatkan tata kelola pemerintahan di kecamatan	Predikat AKIP Kecamatan	Predikat A	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan di kecamatan	Predikat AKIP	A
				Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100
				Siklus Tahunan Desa tepat waktu	3
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	78
				Persentase keluhan/ pengaduan keamanan dan ketertiban ditindaklanjuti	100
Meningkatkan cakupan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase cakupan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat yang difasilitasi	85 %	Meningkatnya keberdayaan masyarakat	Jumlah kegiatan masyarakat yang difasilitasi	85
Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	75 Orang	Meningkatnya kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana di kecamatan	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	75



Tujuan	Indikator Tujuan	Target Kinerja Tujuan Tahun 2021	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran 2021
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pengelolaan budaya dan kerukunan masyarakat di kecamatan	Jumlah konflik SARA	0 Kasus	Meningkatnya pengelolaan budaya dan kerukunan masyarakat di kecamatan	Konflik SARA	0
				Persentase nilai tradisi yang difasilitasi	100

### 3.2. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi uraian garis besar mengenai rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan

Tabel 3.2  
Rekapitulasi Urusan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021

No	Urusan/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah	Pendanaan (Rp)
1	Bidang UrusanKepegawaian		39.505.800
	Jumlah Program	1	
	Jumlah Kegiatan	1	
	Jumlah Sub Kegiatan	1	
2	Bidang Urusan Sekretariat Daerah		4.318.008.234
	Jumlah Program	6	
	Jumlah Kegiatan	10	
	Jumlah Sub Kegiatan	32	

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN DEPOK**

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2021, sebagaimana dalam Formulir Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 Kabupaten Sleman SKPD Kecamatan Depok sebagai berikut:



**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2021 KABUPATEN SLEMAN**

SKPD

KECAMATAN DEPOK

Kode Rekening	Urusan dan Program RPJMD	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
5.03.7.01.0.00.0.00.07.00	KEPEGAWAIAN	KEPEGAWAIAN										39.505.800,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00			
5.03.7.01.0.00.0.00.07.00.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik								39.505.800,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00			
5.03.7.01.0.00.0.00.07.00.02.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi ASN										39.505.800,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00			
5.03.7.01.0.00.0.00.07.00.02.2.01.04		Pengelolaan Data Kepegawaian						Layanan administrasi kepegawaian	12 bulan	Persentase pengelolaan dokumen kepegawaian tepat waktu		39.505.800,00	0,00	0,00	0,00	42.500.000,00	Keg. baru		0
								Pembayaran tenaha non PNS/PHL	12 bulan	Persentase pemenuhan pembayaran kompensasi tenaga non PNS tepat waktu	100%								
								Laporan pelaksanaan Roadmap Reformasi Birokrasi	1 dokumen	Persentase layanan informasi public yang dikelola	100%								
								Pengelolaan informasi dan dokumentasi	12 bulan										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00	SEKRETARIAT DAERAH	KECAMATAN										4.318.008.234,00	0,00	0,00	0,00	4.462.750.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN, PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR, PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR, PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Pelayanan Publik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah		Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran; Persentase pemenuhan kebutuhan Gedung dan perlengkapan kerja	100 %; 20 %					3.680.843.734,00	0,00	0,00	0,00	3.747.200.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.01		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										56.137.500,00	0,00	0,00	0,00	54.750.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.01.01		Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Kecamatan Depok			Dokumen perencanaan kinerja Kecamatan Depok	5 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan dasar hukum perencanaan 5 tahunan dan tahunan tepat waktu	100 %	44.800.000,00	0,00	0,00	0,00	40.500.000,00	Keg. baru		0
								Dokumen Anggaran Kecamatan Depok	4 dokumen										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.01.03		Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah			Kecamatan Depok			Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renja SKPD	2 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tepat waktu	100 %	4.787.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	Keg. baru		0
								Dokumen Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja SKPD	4 dokumen										
								Dokumen Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil Rnja SKPD	5 dokumen										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.01.05		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Kecamatan Depok			Dokumen laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	26 dokumen	Persentase ketersediaan laporan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	6.550.000,00	0,00	0,00	0,00	9.250.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.02		Administrasi Keuangan										3.059.803.976,00	0,00	0,00	0,00	3.158.300.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Kecamatan Depok			Pembayaran gaji dan tunjangan pegawai	12 bulan	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	100%	3.054.503.976,00	0,00	0,00	0,00	3.150.000.000,00	Keg. baru		
								Pembayaran TPP	12 bulan										
								Pembayaran iuran BPJS	12 bulan										
								Insentif pungutan retribusi IMB	12 bulan										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.02.07		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran			Kecamatan Depok			Laporan keuangan semesteran	2 dokumen	Persentase ketersediaan dokumen laporan keuangan dan asset SKPD tepat waktu	100 %	5.300.000,00	0,00	0,00	0,00	8.300.000,00	Keg. baru		
								Laporan aset/BMD semesteran	2 dokumen										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03		Administrasi Umum										564.902.258,00	0,00	0,00	0,00	534.150.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat						Layanan surat menyurat	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan surat	90%	11.400.000,00	0,00	0,00	0,00	13.600.000,00	Keg. baru		0

Kode Rekening	Urusan dan Program RPJMD	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja					Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan 1/2/3	SKPD Penanggung jawab 1/2/3	Keterangan	
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN					DAK
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								Pengelolaan arsip dan perpustakaan	12 bulan	menyurat yang lebih aktif, cepat, dan efisien									
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						Pembayaran jasa langganan	12 bulan	Persentase pemenuhan jasa langganan	100 %	91.402.608,00	0,00	0,00	0,00	93.200.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.07		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			Kecamatan Depok			Pembayaran honorarium pengelola keuangan dan barang	12 bulan	Persentase pemenuhan kompensasi pengelola keuangan dan aset tepat waktu	100 %	45.825.000,00	0,00	0,00	0,00	48.200.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.08		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			Kecamatan Depok			Pelayanan keamanan dan kebersihan kantor	12 bulan	Persentase pemenuhan layanan kebersihan dan keamanan kantor	100 %	152.012.200,00	0,00	0,00	0,00	155.500.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.09		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja								Persentase pemenuhan layanan perbaikan peralatan kerja		34.250.000,00	0,00	0,00	0,00	35.750.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.10		Penyediaan Alat Tulis Kantor			Kecamatan Depok			Alat Tulis Kantor	3 paket	Persentase pemenuhan kebutuhan ATK	100%	37.340.000,00	0,00	0,00	0,00	38.500.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.11		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Kecamatan Depok			Layanan cetak dan penggandaan dokumen	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan cetak dan penggandaan	100 %	5.158.750,00	0,00	0,00	0,00	8.850.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.12		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Kecamatan Depok			Alat listrik	97 unit	Persentase pemenuhan kebutuhan kelistrikan	100 %	4.821.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.17		Penyediaan Makanan dan Minuman			Kecamatan Depok			Layanan penyediaan makanan dan minuman rapat	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman	100 %	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	Keg. baru		0
								Layanan penyediaan makanan dan minuman tamu	12 bulan										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.18		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah						Layanan perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Luar Daerah	100 %	19.320.000,00	0,00	0,00	0,00	8.250.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.28		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor			Kecamatan Depok			Pemeliharaan gedung	5 unit	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	100%	70.707.000,00	0,00	0,00	0,00	37.200.000,00	Keg. baru		0
								Pemeliharaan taman	3 unit										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.30		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional						Layanan pemeliharaan kendaraan dinas	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	100 %	84.465.700,00	0,00	0,00	0,00	81.000.000,00	Keg. baru		0
								Layanan penyediaan BBM kendaraan	12 bulan										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.01.2.03.35		Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur			Kecamatan Depok			Layanan pemeliharaan meubelair	12 bulan	Persentase pemenuhan kebutuhan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	100%	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Keg. baru		0
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Pelayanan Publik</b>	<b>Meningkatnya kualitas pelayanan publik</b>								<b>117.469.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.500.000,00</b>			
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.02.2.01</b>		<b>Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>										<b>13.909.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250.000,00</b>			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.02.2.01.01		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan desa	3 desa	Prosentase peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dan kecamatan	80 %	13.909.000,00	0,00	0,00	0,00	15.250.000,00	Keg. baru		0
								Dokumen hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan	1 dokumen										
<b>7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.02.2.04</b>		<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>										<b>103.560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.250.000,00</b>			

Kode Rekening	Urusan dan Program RPJMD	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.02.2.04.01		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan						Layanan perijinan IMB	12 bulan	Kepuasan pengguna layanan serta meningkatnya kepercayaan publik terhadap pemerintah	77 %	12.075.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.02.2.04.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Non Perizinan			Kecamatan Depok			Layanan administrasi kependudukan	12 bulan	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan	90 %	91.485.000,00	0,00	0,00	0,00	89.250.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.03	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat	30 %					267.807.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.03.2.01		<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>										267.807.000,00	0,00	0,00	0,00	308.000.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.03.2.01.02		Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Kecamatan Depok			Forum koordinasi bidang budaya	56 kali	Cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang budaya dan Sosial	100 %	132.175.000,00	0,00	0,00	0,00	153.000.000,00	Keg. baru		
								Forum koordinasi Bidang Pendidikan	4 kali										
								Forum koordinasi Bidang Sosial	16 kali										
								Forum koordinasi Bidang Kesehatan	6 kali										
								Forum koordinasi Bidang Pemuda dan Olah Raga	6 kali										
								Forum koordinasi Bidang Keagamaan	8 kali										
								Forum koordinasi Bidang Pemberdayaan,Perlindungan Perempuan dan Anak	38 kali										
								Lomba MTQ tingkat kecamatan	1 kali										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.03.2.01.03		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Kecamatan Depok			Pelayanan Bidang Ekonomi	26 kali	Cakupan kegiatan Pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi dan fisik	100 %	135.632.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000.000,00	Keg. baru		0
								Pelayanan Bidang Fisik	6 kali										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.04	<b>PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase penanganan permasalahan penegakkan perda sesuai kewenangan	50 %					90.919.000,00	0,00	0,00	0,00	98.200.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.04.2.01		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>										87.084.000,00	0,00	0,00	0,00	93.250.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.04.2.01.01		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan			Kecamatan Depok			Pemantauan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	12 bulan	Cakupan gangguan kemanan	100 %	87.084.000,00	0,00	0,00	0,00	93.250.000,00	Keg. baru		0
								Pembinaan Linmas	3 kali (...orang)	Cakupan Poskamling yang dibina	90 %								
								Forkompinkec	12 bulan	Cakupan Linmas yang dibina	25 %								
								Fasilitasi kegiatan Unit Reaksi Cepat Pelayanan dan Gangguan Keamanan (PUPM)	12 bulan										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.04.2.02		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada</b>										3.835.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.04.2.02.01		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Kecamatan Depok			Operasi penegakan Peraturan Daerah	14 kali (. bulan)	Cakupan penegakkan Peraturan Daerah	60 %	3.835.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.05	<b>PROGRAM PENINGKATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase rekomendasi FKUB Kecamatan yang	50 %					83.059.500,00	0,00	0,00	0,00	90.300.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.05.2.01		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>										83.059.500,00	0,00	0,00	0,00	90.300.000,00			

Kode Rekening	Urusan dan Program RPJMD	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja				Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan	SKPD Penanggung jawab	Keterangan		
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan									
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	APBD	APBD Prop					APBN	DAK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.05.2.01.01		Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara			Kecamatan Depok			Penyelenggaraan upacara	12 kali	Persentase upacara yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	83.059.500,00	0,00	0,00	0,00	90.300.000,00	Keg. baru		0
								Pertemuan dengan tokoh masyarakat	4 kali	Cakupan permasalahan SARA	100 %								
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase desa menetapkan Peraturan Desa tepat waktu ; Persentase desa melaksanakan Siklus Tahunan desa tepat waktu	50 %; 50 %					77.910.000,00	0,00	0,00	0,00	97.550.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.06.2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										77.910.000,00	0,00	0,00	0,00	97.550.000,00			
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.06.2.01.01		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			Kecamatan Deok			Pembinaan Penyusunan Perdes tentang APBDes, Perubahan APBDes, RKP, Pungutan Desa, dan Pengelolaan TKD	1 kali	Dokumen APBDes, Pertanggungjawaban APBDes dan Peraturan Kepala Desa dilaporkan tepat waktu	80 %	5.955.000,00	0,00	0,00	0,00	9.350.000,00	Keg. baru		0
								Pembinaan, Pendampingan, penyusunan evaluasi APBDes dan Perubahan APBDes	1 kali										
								Laporan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Kepala Desa tentang APBDes dan Perubahan APBDes	1 dokumen										
								Pembinaan Penyusunan Siklus Tahunan Desa	1 kali										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.06.2.01.02		Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kecamatan Depok			Dokumrn Data Monografi Kecamatan	0 dokumen	Data monografi tersusun tepat waktu	100 %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.06.2.01.03		Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa			Kecamatan Depok			Laporan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	1 dokumen	Terbit Administrasi Pemerintahan Desa	80 %	8.710.000,00	0,00	0,00	0,00	10.450.000,00	Keg. baru		0
								Pembinaan pengelolaan ADD dan Dana Desa	1 kali										
								Pembinaan dan pendampingan pengelolaan keuangan desa	2 kali										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.06.2.01.05		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa			Kecamatan Depok			Laporan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1 dokumen	Aparatur pemerintah desa dapat menjalarkan tugas dan fungsinya	80 %	4.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.350.000,00	Keg. baru		0
								Pembinaan dan pengawasan Kepala Desa dan Perangkat Desa	4 kali										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.06.2.01.06		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kecamatan Depok			Laporan fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	1 dokumen	Terbit administrasi pemerintahan desa	80 %	10.950.000,00	0,00	0,00	0,00	17.300.000,00	Keg. baru		0
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.06.2.01.09		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa			Kecamatan Depok			Laporan hasil evaluasi kinerja perangkat daerah	1 dokumen	Terbit administrasi Pemerintahan Desa	80 %	40.375.000,00	0,00	0,00	0,00	44.500.000,00	Keg. baru		0
								Pengisian perangkat desa	1 kali										
								Pembinaan administrasi pemerintahan desa	1 kali	Terbit administrasi Lembaga Desa	80%								
								Pembinaan LKD	1 kali										
								Pembinaan BPD	1 kali										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.06.2.01.11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						Gladi lapang penanggulangan bencana alam	1 kali	Jumlah masyarakat yang terlatih kebencanaan	75 orang	3.905.000,00	0,00	0,00	0,00	5.150.000,00	Keg. baru		

Kode Rekening	Urusan dan Program RPJMD	Urusan/Program/kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp)				Prakiraan Maju	Jenis Kegiatan 1/2/3	SKPD Penanggung jawab 1/2/3	Keterangan
						Hasil Program		Keluaran Kegiatan (Output)		Hasil Kegiatan		APBD	APBD Prop	APBN	DAK				
						Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target								
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
								Forum Koordinasi Komunitas Peduli Bencana	4 kelompok										
								Pembinaan kegiatan mitigasi bencana	1 kali										
7.01.7.01.0.00.0.00.07.00.06.2.01.15		Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan			Kecamatan Depok			Laporan monitoring dan evaluasi tata guna tanah	3 desa	Persentase Tertib Administrasi Pertanahan	60 %	3.915.000,00	0,00	0,00	0,00	5.450.000,00	Keg. baru		0
								Pendampingan pengelolaan tanah	3 desa										
TOTAL												4.357.514.034,00	0,00	0,00	0,00	4.505.250.000,00			



## **BAB V**

### **PENUTUP**


Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 menjamin program, kegiatan, sub kegiatan, dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD Tahun 2021, dan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2021.

Sebagaimana RKPD Tahun 2021, Renja Daerah Tahun 2021 masih akan dihadapkan pada beberapa tantangan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19, diantaranya penurunan pertumbuhan ekonomi, menurunnya pendapatan daerah, potensi meningkatnya jumlah KK miskin, potensi meningkatnya jumlah pengangguran, dan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan. Untuk itu diperlukan kerja cerdas dan upaya bersama semua pemangku kepentingan dalam melewati tantangan diatas.

**Formulir E.70**  
**Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja 2021**  
**Kecamatan Depok**

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja SKPD dan Penyusunan Agenda Kerja.	√			
2.	Pengelolaan data dan informasi.	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan SKPD kabupaten.	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja-SKPD kabupaten tahun lalu berdasarkan renstra-SKPD kabupaten.	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD kabupaten.	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten.	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran.	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9.	Perumusan kebijakan prioritas.	√			
10.	Pelaksanaan forum SKPD Kabupaten.	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan SKPD kabupaten dengan usulan program dan kegiatan hasil musrembang kecamatan.	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan SKPD Kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD Kabupaten.	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten sesuai surat edaran bupati.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan SKPD kabupaten disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar SKPD kabupaten dengan SKPD lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum SKPD kabupaten.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing SKPD kabupaten telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja SKPD kabupaten telah disahkan.	√			

Sleman, 24 Juli 2020  
 Kecamatan Depok,



ABU BAKAR, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19710710 199101 1 002